



Implikasi Pemekaran Kabupaten Natuna Terhadap Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan

Joko Apriadi ¹, Wan Maulidia ², Aulia Agustin ³,
Wiky Abial ⁴, Bagas Setia Ramadhan ⁵

^{1,2,3,4,5}, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Email: jokoapriadi26@gmail.com¹, wanmaulidia04@gmail.com², auliaagustin409@gmail.com³,
bagassetia2112003@gmail.com⁴,

Abstract. *This study analyzes the implications of the establishment of Natuna Regency on accelerating development in the archipelagic region. Using a qualitative approach with literature review, the research evaluates the impact of the division on public services, natural resource management, and infrastructure development. The findings indicate that the establishment of Natuna Regency, enacted through Law Number 53 of 1999, has shortened administrative control spans and improved governance effectiveness. Moreover, the acceleration of development in the maritime, energy, and tourism sectors has significantly contributed to local economic growth. However, challenges such as limited human resources and infrastructure in remote areas remain obstacles. This study recommends optimizing local potential and enhancing community participation in development as strategic steps toward equitable development outcomes.*

Keywords: *Division, Development, Economy, Infrastructure, Tourism.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implikasi pemekaran Kabupaten Natuna terhadap percepatan pembangunan wilayah kepulauan. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi dampak pemekaran terhadap pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Kabupaten Natuna, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, memperpendek rentang kendali administratif dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintah. Selain itu, percepatan pembangunan sektor maritim, energi, dan pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di wilayah terpencil masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi potensi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai langkah strategi untuk pemerataan hasil pembangunan.

Kata Kunci: Pemekaran, Pembangunan, Ekonomi, Infrastruktur, Pariwisata

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Natuna memiliki sejarah panjang sebagai bagian integral dari kepulauan Indonesia. Sejak era lampau, wilayah ini telah berperan signifikan dalam jalur perdagangan maritim dan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Letaknya yang strategis di kawasan Laut China Selatan memberikan Natuna posisi penting dalam mendukung kedaulatan nasional Indonesia (Afandi et al., 2022).

Melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Natuna resmi dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan tujuan meningkatkan efektivitas layanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah yang tersebar ini (Pemkab Natuna, 2015). Ranai,

yang terletak di Pulau Bunguran sebagai pulau utama dalam gugusan Kepulauan Natuna, ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten (Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2020).

Sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, Natuna mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai sektor (Christoforus Ristianto, 2019). Upaya pemerintah meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis maritim, serta penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Di sisi lain, masyarakat Natuna tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, sehingga tercipta keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi budaya (Muhidin, 2020).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2019

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bunguran Timur	14.328	13.958	28.286
2	Bunguran Barat	4.071	3.866	7.937
3	Serasan	2.943	2.736	5.679
4	Bunguran Timur Laut	2.662	2.574	5.236
5	Bunguran Utara	2.101	1.960	4.061
6	Midai	2.017	1.917	3.934
7	Bunguran Batubi	2.017	1.917	3.934
8	Pulau Tiga	2.036	1.848	3.884
9	Bunguran Tengah	1.970	1.827	3.797
10	Subi	1.145	1.198	2.343
11	Serasan Timur	1.711	1.609	3.320
12	Bunguran Selatan	1.825	1.682	3.507
13	Pulau Laut	1.235	1.135	2.370
14	Pulau Tiga Barat	1.186	1.140	2.326
15	Suak Midai	907	890	1.797
16	Seluan	443	411	854
17	Pulau Panjang	426	419	845
Jumlah semua				89.210 Jiwa

Sumber : Website Pemda Kab. Natuna

Tabel diatas menunjukkan distribusi jumlah penduduk di setiap wilayah di Kabupaten Natuna. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah penduduk total di Kabupaten Natuna mencapai 89.210 jiwa, dengan perincian antara jumlah laki-laki dan perempuan yang tersebar di berbagai kecamatan dan pulau. Misalnya, Kecamatan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 28.286 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Bunguran Barat dengan 7.937 jiwa. Adapun kecamatan lainnya, seperti Bunguran Utara dan Midai,

masing-masing memiliki jumlah penduduk sekitar 4.061 dan 3.934 jiwa (PEMKAB NATUNA, 2024).

Gusprinad (2024), menekankan bahwa pemekaran wilayah bertujuan memperpendek rentang kendali administratif, meningkatkan akses layanan publik, serta menciptakan tata kelola yang responsif. Duri & Rahmah (2020), melihatnya sebagai upaya mempercepat pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan mendorong kemandirian ekonomi dengan mengedepankan kedekatan pemerintah dan masyarakat. Sementara itu Ikhsan (2019), menyoroti tantangan pemekaran, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, anggaran, dan komitmen daerah, yang harus diatasi agar potensi wilayah dapat dikelola secara optimal.

Pemekaran wilayah, terutama di kawasan kepulauan, memiliki implikasi yang signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah. Dengan pemekaran, pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat, memungkinkan pemerintah setempat untuk lebih fokus pada kebutuhan lokal seperti infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, potensi sumber daya alam di wilayah kepulauan, seperti perikanan, pariwisata, dan energi, dapat dikelola secara lebih efisien oleh pemerintah daerah baru, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemekaran juga sering kali diikuti oleh pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas komunikasi, yang memperbaiki konektivitas antar pulau dan mendorong distribusi barang serta jasa secara lebih merata.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian ini dan Aminah et al. (2019), dalam "Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah di Indonesia" sama-sama membahas dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini fokus pada Kabupaten Natuna, menunjukkan bahwa pemekaran meningkatkan infrastruktur dan potensi maritim meskipun menghadapi tantangan sumber daya. Sementara itu, Aminah et al. (2019), dengan cakupan nasional, menyimpulkan bahwa 94% daerah hasil pemekaran masih berada pada tingkat kesejahteraan sedang dan rendah, sehingga efektivitas pemekaran dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, sedangkan Aminah et al. memakai metode kuantitatif berbasis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keduanya sepakat bahwa pemekaran menghadapi kendala, namun penelitian ini

merekomendasikan optimalisasi sumber daya lokal, sementara Aminah et al. menekankan evaluasi kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat (Aminah et al., 2019).

Penelitian ini dan Gusprinadi et al. (2024), dalam “Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru Di Papua” sama-sama membahas dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini fokus pada Kabupaten Natuna, yang menunjukkan bahwa pemekaran mempercepat pembangunan wilayah kepulauan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Gusprinadi et al. (2024) dengan fokus pada Papua, mengungkapkan bahwa meskipun pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak masyarakat Papua yang menolak, merasa terasing, dan mengkhawatirkan dampak sosial serta budaya dari pemekaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, sedangkan Gusprinadi et al. menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis terhadap kebijakan pemerintah. Keduanya sepakat bahwa pemekaran wilayah dapat meningkatkan pembangunan, namun penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan potensi lokal yang efektif, sementara Gusprinadi et al. menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran (Gusprinadi, 2024).

Penelitian ini dan Andi Ahmad Rahmansyah San et al. (2023), dalam “Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura Papua” sama-sama membahas dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini fokus pada Kabupaten Jayapura, yang menunjukkan bahwa pemekaran wilayah meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Andi Ahmad Rahmansyah San et al. (2023), juga mengungkapkan bahwa pemekaran di Kabupaten Jayapura berdampak positif dengan meningkatkan otonomi daerah, mempercepat pembangunan, dan menarik investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka, sedangkan Andi Ahmad Rahmansyah San et al. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data ekonomi, sosial, dan demografi. Keduanya sepakat bahwa pemekaran wilayah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pengelolaan sumber daya alam, sementara Andi Ahmad Rahmansyah San et al. menyoroti peran otonomi daerah dan investasi dalam mempercepat pembangunan (Ahmad et al., 2023).

Dalam konteks pemekaran Kabupaten Natuna, penerapan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh (Henrika et al., 2002) dapat memberikan pemahaman tentang

bagaimana pemindahan wewenang ke tingkat pemerintahan daerah yang lebih rendah berpotensi mendorong percepatan pembangunan wilayah kepulauan. Teori ini menjelaskan dua manfaat utama, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, serta perbaikan alokasi sumber daya dengan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka (library research) yang fokus pada pengumpulan data dan informasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Natuna. Menurut Sugiyono (2019), studi pustaka melibatkan serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Hukum et al., 2019). Sementara itu, Nazir (2005) mendefinisikan studi pustaka sebagai proses pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan menyediakan landasan teoretis bagi penelitian dan mengidentifikasi celah yang belum banyak diteliti (Ridwan et al., 2021). Zed (2008) menambahkan bahwa studi pustaka adalah langkah sistematis dalam meneliti dan menelaah dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian serta mendukung argumen yang diajukan peneliti (Arfiani Yulia Aminati dan Budi Purwoko, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Natuna terletak di bagian utara Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, yang terdiri dari sekitar 272 pulau, dengan Pulau Bunguran sebagai pusat administratif. Secara strategis, Natuna berada di Laut Natuna Utara, yang berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura, serta terletak di jalur pelayaran internasional. Pembentukan Kabupaten Natuna diatur melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang memekarkan wilayah dari Kabupaten Kepulauan Riau. Pembentukan kabupaten ini memiliki tujuan untuk memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di kawasan Laut China Selatan, yang memegang peranan penting dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global. Sebagai daerah yang terletak di perbatasan, Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, termasuk cadangan gas alam dan hasil perikanan, yang pengelolaannya menjadi lebih efisien dengan adanya otonomi kabupaten. Keberadaan Kabupaten Natuna juga mendukung

pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, serta memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Selain itu, posisi strategis Natuna berkontribusi pada upaya penguatan posisi Indonesia dalam konteks geopolitik internasional, serta dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah nasional.

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Mardiasmo (2002), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Partisipasi ini tidak hanya sebagai dukungan terhadap program, tetapi juga sebagai faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat antara lain adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka, penyuluhan dan pendidikan mengenai hak-hak serta cara berpartisipasi, keterbukaan dan transparansi dari pemerintah dalam menyampaikan informasi, serta akses yang mudah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pembangunan akan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Teori Mardiasmo (2002) mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat relevan dengan proses yang terjadi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten Natuna serta kegiatan perencanaan pembangunan lainnya. Musrenbang yang dimulai dengan pengumpulan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan dan dilanjutkan di tingkat kabupaten adalah contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan teori Mardiasmo yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat. Proses ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berperan dalam menentukan arah pembangunan, terutama dalam penyusunan RPJM dan RKPT (Mudiyono, 2009).

Kegiatan seperti survei sosial dan teknis untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan prinsip keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan yang dijelaskan oleh Mardiasmo. Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna menunjukkan transparansi dan memberi akses bagi masyarakat untuk memberikan

masuk, sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi yang lebih baik. Dengan tema "Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim," Musrenbang ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna (Pemda Kab. Natuna, 2024).

2. Pemerataan Hasil Pembangunan melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Menurut Mardiasmo (2002), pemerataan hasil pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal adalah strategi yang bertujuan untuk mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata di seluruh wilayah. Pendekatan ini memfokuskan pada pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah-daerah setempat, seperti sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya, untuk mendukung pembangunan yang tidak hanya terpusat di kawasan tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah lain yang membutuhkan. Mardiasmo juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal. Dengan cara ini, hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.

Dalam upaya pemerataan hasil pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, Kabupaten Natuna memiliki berbagai potensi sektor yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor utama yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Tabel berikut menunjukkan komoditas-komoditas utama beserta luas lahan atau jumlah produksi yang ada, serta catatan penting terkait dengan potensi dan tren produksi di masing-masing sektor:

Tabel 2 Potensi Sumber Daya Ekonomi Kabupaten Natuna

Sektor	Komoditas	Luas/jumlah	Produksi	Catatan penting
Pertanian	Padi	132,79 ha	457,73 ton	Produktivitas 1,9 ton/ha
	Ubi kayu	84,4 ha	-	Terbanyak di Kecamatan Serasan
	Jagung	-	9,45 ton	Terbanyak di Bunguran Timur Laut
Hortikultura	Kangkung	59,5 ha	286 kuintal	Terluas
	Cabai besar	27 ha	199 kuintal	Kenaikan 440%

	Mangga	-	4.921 kuintal	Kenaikan 1.023%
	Durian	-	2.220 kuintal	-
Perkebunan	Kelapa	12.405 ha	11.365,80 ton	Komoditas utama
	Cengkeh	12.132,5 ha	7.057 ton	Penurunan 5,7%
	Karet	-	3.575,15 ton	Penurunan 22%
Peternakan	Sapi	-	78.912 kg	Peningkatan dari 2018
	Ayam pendaging	-	633.295 kg	Peningkatan dari 2018
Perikanan	Tangkap laut	-	104.879,81 ton	Terbanyak di Bunguran Barat
	Budidaya laut	-	203,34 ton	-
	Budidaya air tawar	-	36,2 ton	Beberapa kecamatan
Pertambangan	Minyak mentah	-	4.920.340 barel	Pendapatan US\$ 325.897.894
	Gas bumi	-	46.553.622 MMBTU	Pendapatan US\$ 486.217,91

Sumber : Website Pemda Kab. Natuna

Berdasarkan tabel yang disajikan, Kabupaten Natuna memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Sektor pertanian seperti padi, cabai, dan mangga menunjukkan potensi peningkatan produksi, sementara perkebunan kelapa masih dominan meskipun ada penurunan pada cengkeh dan karet. Perikanan tangkap laut mencapai 104.879,81 ton, namun hanya 36% yang dimanfaatkan secara optimal. Di sektor peternakan, produksi sapi dan ayam meningkat, dan sektor pertambangan memberikan pendapatan signifikan dari minyak dan gas bumi (PEMKAB NATUNA, 2024).

Mardiasmo menyoroti peran pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan pemanfaatan sumber daya lokal agar pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan adil. Kebijakan yang mendukung pemerataan hasil pembangunan, menurutnya, harus mencakup peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber daya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain potensi sektor-sektor ekonomi, infrastruktur juga memainkan peran penting dalam mendukung pemerataan hasil pembangunan di Kabupaten Natuna. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat hubungan antar wilayah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor-

sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Berikut adalah gambaran mengenai infrastruktur utama di Kabupaten Natuna pada tahun 2019, yang mencakup berbagai fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan telekomunikasi.

Tabel 3 Infrastruktur Kab. Natuna Tahun 2019

Kategori	Jenis	Jumlah
Kesehatan	Rumah sakit	2
	Puskesmas	14
	Puskesmas pembantu	42
	Polindes	32
Tempat Ibadah	Masjid	148
Jalan	Jalan Negara	117,88 km
	Jalan Provinsi: 143,33 km	143,33 km
	Jalan Kabupaten	780,14 km
Tranfortasi Laut	Kapal Umum	5
Tranfotasi udara	Bandara	1
Telekomunikasi	Layanan 4g dan Tower	52 unit
Layanan Pos	Kantor pos	4
Pendidikan	Sekolah Dasar (SD)	82 sekolah
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27 sekolah
	Sekolah Menengan Atas (SMA)	22 sekolah

Sumber : Wibsite Pemda Kab.Natuna

Infrastruktur seperti jaringan jalan yang luas, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Misalnya, jalan kabupaten yang mencapai lebih dari 780 km dan fasilitas telekomunikasi yang mencakup layanan 4G dapat meningkatkan konektivitas dan akses ke pasar, sementara keberadaan rumah sakit, puskesmas, dan sekolah-sekolah dasar serta menengah memperkuat kualitas hidup masyarakat dan mempercepat proses pemberdayaan sumber daya manusia (PEMKAB NATUNA, 2024).

Pemerataan hasil pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2002), mengarah pada pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Pendekatan ini relevan dalam konteks Kabupaten Natuna, yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata, namun masih menghadapi tantangan dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya tersebut.

Sektor perikanan Kabupaten Natuna memiliki potensi yang signifikan, dengan hasil tangkapan yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun. Namun, berdasarkan data yang ada, hanya sekitar 36% dari potensi tersebut yang dimanfaatkan secara efektif. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya laut yang lebih optimal akan berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan ekonomi daerah (Mespian, 2022).

Selain itu, sektor pariwisata, terutama ekowisata, juga memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Natuna. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata berbasis ekologi (Novianti, 2016). Dalam hal ini, pengelolaan objek wisata dan penyediaan akomodasi yang melibatkan masyarakat lokal dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dan alam. Pendekatan ini juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengembangan kesadaran sosial terhadap pentingnya keberlanjutan ekosistem.

3. Perbaikan Alokasi Sumber Daya dengan Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat dan Berbasis Informasi Lokal

Menurut Mardiasmo (2002), perbaikan alokasi sumber daya dengan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi lokal dapat dilakukan dengan memanfaatkan data lokal yang relevan untuk mendukung keputusan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini juga melibatkan desentralisasi keputusan, memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar sumber daya dialokasikan lebih efisien. Selain itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara efisien dengan mempertimbangkan informasi yang tepat dan evaluasi yang efektif untuk

memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memenuhi tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, pengambilan keputusan berbasis informasi lokal dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam alokasi sumber daya.

Pemerintahan Kabupaten Natuna telah melakukan perbaikan alokasi sumber daya dengan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi lokal. Hal ini melibatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia secara efisien, terutama dalam sektor perikanan dan pariwisata. Pemerintahan Kabupaten Natuna juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui evaluasi berkala. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui forum publik, memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi mereka. Dengan menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemekaran Kabupaten Natuna telah membawa dampak positif terhadap percepatan pembangunan wilayah kepulauan, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan infrastruktur. Namun, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan strategi untuk mengatasi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan konektivitas antar pulau. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan sektor unggulan seperti perikanan dan pariwisata, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, Kabupaten Natuna dapat menjadi contoh keberhasilan pemekaran pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia.

5. DAFTAR REFERENSI

Afandi, F. G., Yoegiantoro, D., & ... (2022). Analisis kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan perairan Natuna Utara. *Jurnal ...*, 6(1), 1836–1841. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034677&val=20674&title=Analisis> Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan

Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara

- Ahmad, A., San, R., Lantara, N., Arfah, A., Arif, M., & Ameliana, Y. (2023). Pengaruh pemekaran 5 wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura Papua. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 369–373.
- Aminah, Lindrianasari, E., Evana, E., Tarmizi, R., & Khairudin. (2019). Efektivitas 20 tahun implementasi pemekaran daerah di Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 04(03), 2477–3824.
- Arfiani Yulia Aminati, & Purwoko, B. (2013). Resolusi konflik interpersonal. *BK Unesa*, 3(1).
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Dari paku sampai suremana: Sejarah batas selatan dan utara Mandar. 6.
- Christoforus Ristianto, S. A. (2019, January 28). Wiranto: Wilayah perbatasan Indonesia masih rapuh. *KOMPAS.COM*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/28/12012871/wiranto-wilayah-perbatasan-indonesia-masih-rapuh>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi pemekaran daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 43–52.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>
- Gusprinadi, H. (2024). Implikasi pemekaran wilayah daerah otonomi baru di Papua. *Jurnal Lanskap Politik*, 2, 50–54. <http://doi.org/10.31942/jlp.2024.2.1>
- Henrika, C., Tri Adi, N., & Mardiasmo, M. (2002). Analisis pengaruh strategi institusi, budaya institusi, dan conflict of interest terhadap budgetary slack. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17(1), 105–113.
- Hukum, M., Di, A., & Bogor, K. (2019). Pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah. 8(24).
- Ikhsan, I. (2019). Pemekaran daerah: Peluang dan tantangan bagi pemekaran Kota Meulaboh. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 159–166.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.764>
- Mardiasmo. (2002). Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik: Telaah kritis terhadap upaya aktualisasi kebutuhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(1), 63–82.
- Muhidin, R. (2020). Topinimi maritim Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 18(1), 113.
- PEMKAB NATUNA. (2024). Pemerintah Kabupaten Natuna, Luat Sakti Rantau Bertuah. Pemkab Natuna.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42.
<https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>